

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi atau penyalur dana dari pemilik dana kepada pemakai dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif memiliki pengaruh terhadap perkembangan sektor riil. Semakin tinggi intensitas intermediasi lembaga keuangan terhadap penyaluran dana guna pengembangan sektor riil maka akan berdampak kepada kinerja perekonomian yang akan semakin membaik. Menurut Syahril Sabirin (1999), sektor perbankan memiliki peranan yang penting dalam proses *recovery* perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank juga berperan dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran nasional. Selain itu, sektor perbankan juga berfungsi sebagai alat transmisi kebijakan moneter.

Di Indonesia, perkembangan industri perbankan dalam sektor keuangan lebih dipacu oleh pertumbuhan bank-bank sejak deregulasi sektor keuangan Oktober 1988. Sejak saat itu dan sampai saat ini, industri perbankan menjadi industri yang dominan dalam sektor keuangan (Chaikal dan Perry, 2006). Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 memberikan perubahan yang fundamental dalam sistem perbankan di Indonesia, dan itu berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-undang tersebut sistem perbankan telah disederhanakan dengan menghilangkan perbedaan fungsi-fungsi operasional bank secara struktural sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 yang membedakan antara bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan usaha bank yang dipisahkan berdasarkan fungsinya tersebut sebenarnya sudah tidak tepat, karena pada dasarnya semua jenis bank dapat beroperasi sebagai bank umum kecuali Bank Perkreditan Rakyat. Oleh karena itu, sistem perbankan Indonesia pasca Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 hanya

dikenal dua jenis bank dilihat dari fungsinya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selain itu, dari sudut operasionalnya diperkenalkan pula satu sistem perbankan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) atau sistem perbankan syariah yang dapat dilakukan oleh bank umum maupun BPR.

Praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah semakin meningkat di Indonesia semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1992. Dengan diperkenalkannya jenis bank berdasarkan prinsip syariah, maka selain bank konvensional dimungkinkan pula beroperasinya bank berdasarkan prinsip *syariah* (Dahlan Siamat, 2005). Dengan demikian Indonesia telah menganut *Dual Banking Principles under One Banking Sistem*.

Perkembangan perbankan syariah atau yang lebih dikenal dengan bank Islam dimulai sejak eksperimen pertama didirikannya bank Islam oleh *mit Ghamr* pada tahun 1960-an. Perkembangan bank-bank Islam mulai meningkat tajam setelah awal berdirinya pada tahun 1960-an. Dari hanya satu bank pada awal tahun 1970-an, meningkat menjadi sembilan pada tahun 1980. Diantaranya adalah Bank Sosial Nasser (1971), Bank Pembangunan Islam (1975), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), Bank Islam Faisal Sudan (1977), Lembaga Keuangan Kuwait (1977), Bank Islam Bahrain (1979), dan Bank Islam Internasional dalam investasi dan pembangunan (1980). Antara tahun 1981-1985, sekitar 24 bank Islam dan lembaga keuangan lainnya telah didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Denmark, Selandia Baru, Turki, Inggris, Yordania, Tunisia dan Mauritania. Kebanyakan bank-bank Islam maupun lembaga keuangan berdiri hampir diseluruh negara muslim. Disamping itu, di negara-negara non muslim yang jumlah umat Islamnya minoritas, seperti Amerika Serikat atau Australia, berusaha mendirikan Lembaga Keuangan Islam (Abdullah Saeed, 2004).

Di Indonesia sendiri, pendirian bank syariah baru ada pada tahun 1992, tepatnya mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pada masa-masa awal operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Perkembangan ini misalnya

dapat ditilik dari jaringan kantor perbankan syariah, yang di tahun 1998 baru ada satu bank umum syariah dengan 10 kantor cabang, 1 kantor cabang pembantu, serta 19 kantor kas. Namun, pada akhir tahun 2006 perkembangan perbankan syariah telah menunjukkan hasil yang mengembirakan dengan bertambahnya jumlah bank umum syariah menjadi 3 dan ditambah lagi dengan adanya 20 Unit Usaha Syariah yang seluruhnya memiliki 209 kantor cabang, 116 kantor cabang pembantu, 21 unit pelayanan syariah dan 162 kantor kas (Laporan Perkembangan Perbankan Syariah, BI 2006).

Kegiatan bank syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak berdasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip bagi hasil sebagaimana digariskan oleh *syariat* (hukum) Islam. Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar yang menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan/atau pemberian imbalan atas dana masyarakat. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata bedasarkan pada prinsip syariah. Kebalikannya dengan bank konvensional dimana imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga. Tingkat bunga yang dinyatakan dalam persentase tersebut merupakan aspek penting yang selalu terkait dengan kegiatan usaha bank konvensional.

Khusus mengenai bank syariah perlu dikemukakan bahwa pengalaman selama krisis ekonomi ada suatu pelajaran berharga bahwa prinsip *risk sharing* (berbagi risiko) atau *profit and loss sharing* (bagi hasil), sebagaimana yang terdapat pada sistem bank berdasarkan prinsip syariah, merupakan suatu prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi. Dalam hal ini prinsip bagi hasil atau berbagi risiko antara pemilik dana dan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas dari awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi misalnya, maka risiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Dengan demikian kesulitan ekonomi akan relatif lebih ringan terasa oleh perorangan dan badan usaha secara individual, dan dengan demikian kebangkitan kembali ekonomi dapat diharapkan berlangsung lebih cepat.

Setelah satu dasawarsa berlalunya krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia, perkembangan dunia perbankan nasional mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator perbankan nasional. Perkembangan dunia perbankan nasional mengalami pertumbuhan aset yang cukup signifikan yaitu sebesar 54,31% selama lima tahun terakhir, dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Salah satu pendorong dari peningkatan aset perbankan nasional adalah peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 55,92%, selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1
Indikator Utama Perbankan Indonesia
(dalam milyar rupiah)

Indikator	2002	2003	2004	2005	2006
Aset	1.116.291	1.221.463	1.287.291	1.490.707	1.722.572
DPK	838.696	894.292	974.824	1.142.770	1.307.774
Kredit	374.335	446.066	606.794	710.880	749.742
LDR	44.63%	49.88%	62.25%	62.21%	57.33%
NPL	7.47%	6.72%	4.19%	7.46%	6.54%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2006, BI

Loan to Deposit Ratio (LDR), yang menjadi indikator seberapa besar bank menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, selama lima tahun terakhir telah banyak mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 LDR perbankan nasional hanya 44,63%, dan pada tahun 2006, LDR perbankan nasional meningkat menjadi 57,33%. Peningkatan LDR perbankan nasional ini, mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan nasional semakin menunjukkan peran sertanya dalam menumbuhkan sektor riil.

Selain dari itu, pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) yang dihadapi dunia perbankan nasional juga relatif stabil dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2002, NPL perbankan nasional mencapai 7,47% dan pada akhir tahun 2006 sudah menurun menjadi 6,54%. Hal ini tentunya sudah merupakan suatu kerja yang baik bagi dunia perbankan nasional, mengingat indikator-indikator lainnya juga menunjukkan suatu hasil baik pula.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank harus memegang prinsip *prudential*, yaitu prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan dana untuk pembiayaan/investasi. Karena hal ini terkait erat dengan kinerja bank itu sendiri, terlebih dalam hal kesehatannya. Semakin baik manajemen penyaluran dana untuk pembiayaan/investasi dalam suatu bank maka semakin baik pula bank tersebut dalam menjaga kesehatannya.

Perkembangan dunia perbankan nasional yang dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kinerja yang baik, belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika dilihat dari besarnya penyaluran dana nasabah sebagai usaha dalam menggerakkan sektor riil (LDR) yang besarnya berkisar pada level 60 persen, tentunya dirasa masih sangat rendah. Karena hal ini mengindikasikan bahwa ada dana pihak ketiga yang belum tersalurkan secara sempurna ke sektor riil yang menjadi hakekat pembangunan seutuhnya. Atau dengan kata lain, dana masyarakat yang tersimpan di bank disalurkan pada pos-pos lain yang tidak sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

Selain dari itu, jika ditinjau dari besarnya NPL perbankan nasional yang berkisar pada level 6 persen, tentunya belum benar-benar menunjukkan kinerja yang baik. Karena angka tersebut masih belum masuk dalam kategori suatu bank dikatakan sehat atau berkinerja baik dalam menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential*). Karena Bank Indonesia sebagai bank sentral mensyaratkan agar besarnya NPL tidak lebih dari 5%. Dan jika hal itu terjadi maka bank yang bersangkutan termasuk bank dalam pantauan BI.

Sedangkan, jika kita bandingkan indikator perkembangan perbankan syariah dengan dunia perbankan nasional secara keseluruhan, dapat kita lihat bahwa indikator-indikator yang ada menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah jauh lebih baik dibandingkan dengan perbankan nasional. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Indikator Utama Perbankan Syariah
(dalam miliar rupiah)

Indikator	2002	2003	2004	2005	2006
Aset	4.087	7.945	15.210	20.880	28.722
DPK	2.918	5.725	11.718	15.581	20.672
Pembiayaan	3.277	5.561	11.324	15.232	20.445
FDR	112.30%	97.14%	96.64%	97.76%	98.90%
NPF	4.12%	2.34%	2.38%	2.82%	4.75%

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2006, BI

Jika dilihat dari rasio pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya dana pihak ketiga (*Financing to Deposit Ratio/FDR*), bank syariah memiliki rata-rata FDR sebesar 100%. Artinya, bank syariah betul-betul menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, dengan demikian bank syariah turut berperan serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Dan dilihat dari besarnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*), bank syariah masih dibawah batas aman bank dalam pengawasan. Artinya, secara umum perbankan syariah relatif lebih sehat.

Salah satu tolak ukur kesehatan suatu bank dinilai dari lancar-tidaknya pengembalian pembiayaan/investasi yang disalurkan. Parameter dalam mengukur pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari rasio NPL, untuk bank konvensional atau NPF, untuk bank syariah. NPL bank konvensional masih di atas rata-rata yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sedangkan NPF bank syariah berada di bawah rata-rata yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu pada level 5 persen.

Ini menunjukkan bahwa bank syariah relatif lebih sehat daripada bank konvensional. Padahal jika dilihat dari segi aset, yang berimplikasi kepada besarnya *market share* dalam dunia perbankan, *market share* bank konvensional jauh lebih besar daripada *market share* bank syariah yang hanya 1,76% pada akhir tahun 2006. Dan jika dilihat dari persentase dana yang disalurkan terhadap dana yang dihimpun (LDR atau FDR), perbankan syariah memiliki FDR berkisar pada besaran 100 persen yang jauh lebih baik daripada perbankan konvensional yang

LDR-nya hanya berkisar 60 persen. Selain itu, jika dilihat dari segi usia, bank syariah masih relatif baru dalam dunia perbankan nasional.

1.2 Perumusan Masalah

Perbankan syariah dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan timbulnya pembiayaan bermasalah, seperti tingginya tingkat penyaluran dana kepada masyarakat (FDR) dengan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, rendahnya alternatif dalam penempatan dana dan beban risiko yang relatif besar dengan penggunaan sistem *profit and loss sharing* memiliki rasio pembiayaan bermasalah yang lebih kecil (lebih baik) dibandingkan dengan perbankan konvensional. Padahal perbankan konvensional lebih memungkinkan untuk meredam timbulnya pembiayaan bermasalah dengan rendahnya tingkat penyaluran dana, berbagai alternatif penempatan dana seperti diperbolehkannya kredit derivatif dan sistem bunga yang dianutnya.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga yang kompetitif, perbankan syariah dengan pertumbuhan pembiayaan yang sangat tinggi memiliki risiko kegagalan atau rasio pembiayaan bermasalah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional yang memiliki tingkat pertumbuhan kredit yang relatif lebih kecil. Padahal, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi di suatu bank akan mendorong tingginya rasio pembiayaan bermasalah pada bank tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi perekonomian setelah terjadinya krisis moneter, ada kesenjangan dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dimana tingkat kesehatan perbankan syariah dengan rasio NPF yang lebih rendah, lebih baik daripada perbankan konvensional yang memiliki rasio NPL yang lebih tinggi. Dan ini artinya bank konvensional belum menjalankan fungsi perbankan secara baik terutama dalam kaitannya dengan menjalankan prinsip *prudential* sebagaimana yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Selain dari itu, seiring dengan meningkatnya *market share* perbankan syariah terhadap *market share* perbankan nasional, pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah juga ikut meningkat. Padahal dalam kondisi *market share* yang

relatif kecil perbankan syariah mampu mempertahankan kinerjanya dalam menjaga tingkat kesehatannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah bahwa pada perbankan konvensional dengan *market share* yang tinggi dan *loan to deposit ratio* yang rendah memiliki pembiayaan bermasalah yang tidak lebih baik dari pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dengan *market share* yang jauh lebih rendah dan *financing to deposit ratio* yang jauh lebih tinggi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari pemaparan masalah penelitian, maka ada beberapa pertanyaan penelitian guna menyelesaikan masalah penelitian yang tersebut di atas, antara lain:

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pembiayaan bermasalah antara perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia?
2. Apakah meningkatnya pembiayaan diwaktu-waktu yang lalu pada perbankan syariah dan perbankan konvensional ikut mempengaruhi besarnya pembiayaan bermasalah pada masing-masing kelompok bank?
3. Apakah pertumbuhan *market share* ikut mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka dalam tesis ini tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan NPF perbankan syariah dan NPL perbankan konvensional.
2. Mengidentifikasi dan mengantisipasi adanya perubahan pembiayaan bermasalah seiring dengan pertumbuhan pembiayaan pada periode-periode sebelumnya di masing-masing kelompok bank.
3. Mengidentifikasi adanya peningkatan NPF pada perbankan syariah seiring dengan bertambahnya *market share* perbankan syariah.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam tesis ini tidak terlalu luas dan fokus maka ada beberapa pembatasan masalah, antara lain:

1. Faktor-faktor yang akan diidentifikasi dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dan perbankan konvensional dibatasi hanya berupa pertumbuhan pendapatan nasional, tingkat suku bunga riil, pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan dana pihak ketiga serta *market share* masing-masing kelompok perbankan.
2. Data yang digunakan dalam tesis ini adalah data triwulanan dari triwulan I tahun 2001 sampai dengan triwulan III tahun 2007.
3. Data perbankan konvensional yang digunakan adalah data bank dalam kategori bank umum konvensional dan data perbankan syariah yang digunakan adalah data bank dalam kategori bank umum syariah dan unit usaha syariah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Seiring dengan berlalunya krisis ekonomi yang menerpa negara-negara di dunia ketiga, tidak terkecuali Indonesia, pertumbuhan ekonomi juga semakin membaik. Dunia perbankan sebagai salah satu penggerak sektor riil menjadi elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi antara sektor moneter dan sektor riil, bank memiliki keterkaitan yang kuat dengan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu wilayah.

Faktor-faktor makroekonomi disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang ikut mempengaruhi kinerja perbankan nasional. Dalam penelitian yang dilakukan Wu, Chang dan Selvili (2003), *Non Performing Loan* diduga disebabkan oleh kondisi makroekonomi yang digambarkan oleh pertumbuhan pendapatan nasional, kondisi pasar real estate dan kebijakan kredit dari bank dalam memberikan kredit. Jika kondisi makroekonomi dan pasar real estate baik, NPL semestinya rendah. Namun jika pada kondisi tersebut NPL meningkat, berarti kemacetan disebabkan oleh *risky lending behavior*, dimana pihak bank tidak cukup berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya.

Peng, Gerlach dan Shu (2003) dalam penelitiannya terhadap kinerja Bank di Hongkong mengungkapkan bahwa estimasi keseluruhan variabel (*macro, financial* dan *bank*) tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap NPL, tetapi setelah dilakukan pemilihan variabel hasil estimasi model NPL menunjukkan bahwa variabel ekonomi pertumbuhan GDP, inflasi dan perubahan harga properti di Hongkong mengurangi rasio NPL, hal ini berbeda dengan bunga jangka pendek yang menaikkan rasio NPL. Kenaikan inflasi menurunkan NPL karena nilai riil dari hutang turun sehingga meningkatkan kemampuan membayar debitur. Dan *interest rate* berhubungan positif dengan NPL.

Tingkat suku bunga yang diberlakukan oleh Bank Indonesia secara tidak langsung mempengaruhi besarnya pembiayaan bermasalah. Suthep Kittikulsih mencoba melihat masalah NPL dari sisi nasabah. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa ketika tingkat bunga tinggi, para pengusaha akan kesulitan untuk mengembalikan kreditnya dan dalam penelitiannya, Kittikulsih (2002) melihat pada pertumbuhan GDP -10%, setengah dari pinjaman akan macet dan total ekuitas dari sistem bank akan hilang.

Salah satu instrumen moneter yang digunakan Bank Indonesia adalah tingkat suku bunga SBI (Setifikat Bank Indonesia) bagi perbankan konvensional dan SWBI (Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia) bagi perbankan syariah. Meskipun ada perbedaan instrumen moneter antara bank konvensional dan bank syariah, kebijakan moneter melalui SBI lebih berdampak kepada perbankan syariah. Hal ini disebabkan masih baru dan kecilnya kontribusi perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional. Dalam penelitiannya, Hartono (2006) menyatakan bahwa Suku Bunga SBI dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank syariah tertua di Indonesia, berpengaruh terhadap NPF BMI. Setiap peningkatan Suku Bunga SBI akan mengakibatkan kenaikan NPF BMI dan setiap peningkatan DPK BMI akan mengakibatkan penurunan NPF BMI.

Tingginya tingkat suku bunga SBI berdampak kepada investasi/aktivitas bisnis di sektor riil menurun, tingkat inflasi bertambah tinggi dan daya beli masyarakat rendah sehingga keuntungan yang diperoleh pelaku usaha di sektor riil menjadi berkurang. Hal ini tentunya mengurangi kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada dunia perbankan, yang pada akhirnya

menyebabkan tingginya pembiayaan bermasalah. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga SBI rendah, maka aktivitas bisnis meningkat, inflasi rendah dan daya beli meningkat sehingga keuntungan sektor riil meningkat dan kemampuan membayar kewajiban kepada bank juga ikut meningkat. Hal ini tentunya mengurangi pembiayaan bermasalah pada sektor perbankan.

Adanya suatu peningkatan yang cepat dalam portofolio hutang memiliki hubungan positif dengan peningkatan rasio *nonperforming loan* di kemudian hari. Lebih dari itu, persetujuan kredit selama masa *economic booming* memberikan *probability of default* yang tinggi sehingga persetujuan kredit selama masa itu akan mengalami pertumbuhan yang lambat. Pada masa *economic booming* kebutuhan akan jaminan diperlonggar, dan sebaliknya ketika resesi, ditemukan adanya suatu penyimpangan standar kredit selama masa ekspansi (Jiménez dan Saurina, 2006).

Borio, Furfine dan Lowe (2001) menjelaskan bahwa dimasa *economic booming*, ketika terjadi percepatan kredit/pembiayaan, maka akan memicu timbulnya pembiayaan bermasalah pada periode yang akan datang. Sedangkan selama periode resesi, ketika bank membatasi pertumbuhan kredit dengan jalan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, yang dalam hal ini erat kaitan dengan mutu peminjam dan kondisi-kondisi pinjaman. Oleh karena itu, perhatian pengawasan perbankan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana penjelasan *procyclicality* sebagai bekas kontribusi risiko kredit, sebagai lawan perilaku bekas pos risiko kredit (yaitu, *nonperforming loans*), yang meningkat selama resesi dan menurun pada masa yang baik.

1.7 Hipotesis Penelitian

Berangkat dari kerangka teori yang ada, maka penelitian ini merumuskan beberapa hipotesis, antara lain:

1. H_0 : Pertumbuhan pendapatan nasional, tingkat suku bunga riil, pertumbuhan pembiayaan (*financing growth rate*), pertumbuhan dana pihak ketiga dan *market share* perbankan syariah secara bersama-sama tidak mempengaruhi pembiayaan bermasalah perbankan syariah.

- H_1 : Pertumbuhan pendapatan nasional, tingkat suku bunga riil, *financing growth rate*, pertumbuhan dana pihak ketiga dan *market share* perbankan syariah secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan bermasalah perbankan syariah.
2. H_0 : Pertumbuhan pendapatan nasional, tingkat suku bunga riil, *financing growth rate*, pertumbuhan dana pihak ketiga dan *market share* perbankan konvensional secara bersama-sama tidak mempengaruhi pembiayaan bermasalah perbankan konvensional.
- H_1 : Pertumbuhan pendapatan nasional, tingkat suku bunga riil, *financing growth rate*, pertumbuhan dana pihak ketiga dan *market share* perbankan konvensional secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan bermasalah perbankan konvensional.
3. H_0 : Variabel-variabel penelitian yang mempengaruhi NPF perbankan syariah tidak berbeda signifikan dengan variabel-variabel penelitian yang mempengaruhi NPL perbankan konvensional.
- H_1 : Variabel-variabel penelitian yang mempengaruhi NPF perbankan syariah berbeda signifikan dengan variabel-variabel penelitian yang mempengaruhi NPL perbankan konvensional.
4. H_0 : *Financing growth rate* pada periode-periode sebelumnya tidak ikut mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada masing-masing kelompok bank.
- H_1 : *Financing growth rate* pada periode-periode sebelumnya ikut mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada masing-masing kelompok bank.
5. H_0 : Pertumbuhan *market share* perbankan syariah tidak ikut mempengaruhi pembiayaannya bermasalahnya.
- H_1 : Pertumbuhan *market share* perbankan syariah mempengaruhi pembiayaannya bermasalahnya.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan asosiatif. Menurut Moh. Nazir (hal. 63-64, 1988), tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan pendekatan asosiatif dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam metode deskriptif peneliti ini peneliti juga ingin membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga menjadikannya sebagai suatu studi komparatif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu.

Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Perbankan Nasional yang ada pada Bank Indonesia, dan data-data lain yang diperoleh dari berbagai sumber sebagaimana kebutuhan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* triwulanan. Pemilihan variabel-variabel penelitian mengacu kepada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya seperti penelitian Peng, Gerlach dan Shu (2003) dan penelitian Gabriel Jiménez and Jesús Saurina (2006) dan penelitian-penelitian lainnya yang serupa. Dalam hal ini penulis mencoba menggunakan pendekatan *Autoregressive* dan *Distributed Lag*. Adapun model awal yang ditawarkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$NPL_t^* = \beta_1 GDPG_t^* + \beta_2 SBR_t^* + \beta_3 FING_t^* + \beta_4 DPKG_t^* + \beta_5 SIZE_t^* + \eta + \varepsilon_t$$

dimana:

NPL = Rasio NPL (*non performing loan*)

GDPG = *Growth* GDP riil

SBR = Tingkat suku bunga riil

FING = *Financing growth rate* perbankan

DPKG = Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

SIZE = Pangsa pasar atau *market share* perbankan

Pembentukan model penelitian di atas tentunya akan mengalami penyesuaian, seberapa besar lag yang terbentuk dari masing-masing variabel penelitian. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan analisis dan karakteristik data perbankan nasional.

Dalam pembentukan model *Autoregressive* dan *Distributed Lag* ada beberapa asumsi yang dipakai guna memenuhi syarat pembentukan model. Adapun syarat-syarat yang digunakan dalam pembentukan model *Autoregressive* dan *Distributed Lag* sama dengan syarat dalam pembentukan regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu terpenuhinya syarat-syarat BLUE, seperti bebas dari multikolinieritas, otokorelasi dan heteroskedastisitas. Proses ini dilanjutkan dengan melakukan beberapa penyesuaian hingga diperoleh suatu model terbaik yang dapat menggambarkan hubungan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Setelah melalui proses pengujian dan pembentukan model, maka langkah selanjutnya adalah membuat analisa hasil penelitian dan membuat estimasi atas model yang didapat.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan; menjabarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kerangka teori, hipotesis penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori; menguraikan teori yang mendasari analisis dalam penelitian, yaitu teori-teori yang terkait dengan *non performing loan* dan menjelaskan tentang praktek penyaluran dana yang dilakukan dunia perbankan. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan tentang telaah literatur, referensi, jurnal dan artikel terkait dengan *non performing loan*, yang disertai dengan acuan pada penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing loan*.

BAB III Data dan Metodologi Penelitian; menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan, data dan sumbernya, rancangan model penelitian, penjelasan variabel-variabel penelitian, metode analisis pengujian data. Pada bagian akhir disajikan diagram alur (*flow diagram*) untuk menggambarkan proses

tahapan pengujian data penelitian sampai dengan menentukan hubungan dari masing-masing variabel penelitian yang mempengaruhi variabel *dependent* dalam membentuk model estimasi.

BAB IV Analisis dan Pembahasan; merupakan uraian hasil penelitian dengan mengacu pada teori yang dijelaskan pada bab dua dengan menggunakan metode pengolahan sesuai dengan tahap-tahap penelitian yang telah dilakukan. Di sini juga akan dilakukan analisis terhadap hasil pengujian data statistik dengan mengaitkannya kepada teori yang mendasarinya.

BAB V Kesimpulan dan Saran; Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, selanjutnya diambil beberapa kesimpulan penelitian dan saran untuk studi di waktu yang akan datang.

